

**UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENDORONG
PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DESA, (Studi Kasus Desa Mongan Poula
Kecamatan Siberut Utara Kepulauan Mentawai Tahun 2022)**

SKRIPSI

Oleh :

AKRAMUL Mulsidi.S

BP . 21100010

*Diajukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat*

Oleh :

AKRAMUL Mursidi.S

BP. 21100010



PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

PADANG

2025

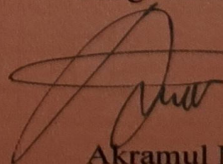
PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi dengan judul **UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA (Studi khusus Desa Mongan Poula Kecamatan Siberut Utara Kepulauan Mentawai)** adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/ doktor), baik di program studi maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusnya saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali bantuan dan arahan dari tim pembimbing.
3. Karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang di tulis atau di publikasikan oleh orang lain, kecuali di kutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya dengan di sebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karna karya tulis ini, serta sanksi lainnya dengan norma dan ketentuan lainnya yang berlaku.

Padang, 28 Januari 2026

Yang membuat pernyataan

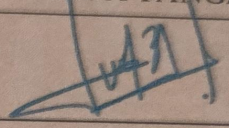
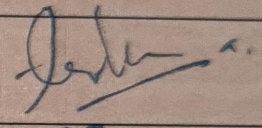
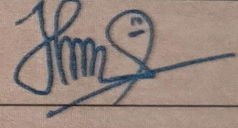


Akramul Mulsidi.s

Bp.21100010

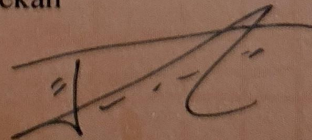
HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah di uji di depan sidang Ujian Skripsi Program Studi Ilmu Politik pada Tanggal 25 Agustus 2025 bertempat di Ruang Sidang Program Studi Ilmu Politik, dengan Tim Penguji :

TIM PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
Lara Indah Yandri, S.IP ,M.IP	Ketua	
Didi Rahmadi, S.Sos, MA	Sekretaris	
Tesha Dwi Putri, S.IP., M.Si.	Pembimbing I	
Khairiyah, S.IP, M.HI	Pembimbing II	

Mengeteahui,

Dekan



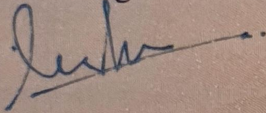
Dr. Teguh Haria Aditia Putra, MP

NIDN : 1030108501

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Akramul Mulsidi.s
Nomor Induk Mahasiswa : 21100010
Judul Skripsi : Upaya Pemerintah Desa Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Insfrastruktur Desa, Studi kasus Desa Mongan Poula Kecamatan Siberut Utara Kepulauan Mentawai.

Pembimbing I



Tesha Dwi Putri, S.IP., M.Si.
NIDN.1025078902

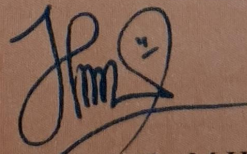
Pembimbing II



Khairiyah, S.IP., M.HI.
NIDN.1025059204

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Khairiyah, S.IP., M.HI.

NIDN.1025059204

ABSTRAK

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan lokal. Desa Mongan Poula dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses pembangunan, khususnya melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Pemerintah Desa Mongan Poula dalam mendorong partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat antara lain kepercayaan terhadap pemerintah desa, ketersediaan informasi, kuatnya ikatan sosial, dan budaya gotong royong. Partisipasi yang tinggi juga didukung oleh keterlibatan tokoh adat, pemuda, serta kelompok perempuan. Dengan pendekatan yang humanis dan terbuka, Pemerintah Desa Mongan Poula berhasil menjadikan partisipasi masyarakat sebagai kekuatan utama dalam pembangunan desa.

Kata Kunci : Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Infrastruktur Desa

ABSTRACT

The importance of community participation in village development is essential to achieving sustainable and locally based development. Mongan Poula Village was chosen as the research location because it has a relatively high level of community participation in the development process, particularly through the Village Development Planning Forum (Musrenbang). This study aims to identify the efforts of the Mongan Poula Village Government in encouraging community participation in village infrastructure development. This research uses a qualitative method with a case study approach. The factors that influence community participation include trust in the village government, the availability of information, strong social ties, and the culture of mutual cooperation. High participation is also supported by the involvement of traditional leaders, youth, and women's groups. Through a humanistic and open approach, the Mongan Poula Village Government has successfully made community participation the main strength in village development.

Keywords: Village Government, Community Participation, Village Infrastructure Development

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Upaya Pemerintah Desa dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Kasus Desa Mongan Poula, Kecamatan Siberut Utara, Kepulauan Mentawai Tahun 2022)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Skripsi ini disusun sebagai bentuk kepedulian penulis terhadap pentingnya peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa, khususnya infrastruktur yang sangat menentukan kemajuan dan kesejahteraan warga. Penelitian ini dilakukan di Desa Mongan Poula, yang telah menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang).

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta dan keluarga besar yang selalu memberikan dukungan moril, doa, dan semangat kepada penulis.
2. Ibu Tesha Dwi Putri, S.IP., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I, dan Ibu Khairiyah, S.IP., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan secara maksimal selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Didi Rahmadi, M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik FISIPOL Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
4. Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama masa studi penulis.
5. Pemerintah Desa Mongan Poula, khususnya Bapak Asrul Sani, S.Ag beserta seluruh perangkat desa dan masyarakat yang telah bersedia menjadi informan dan memberikan informasi yang sangat berharga dalam penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagai seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari pencipta untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

6. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Ilmu Politik yang telah memberikan semangat dan kebersamaan selama menempuh pendidikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan, baik dalam isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya dalam pengembangan ilmu politik dan praktik pemerintahan desa yang partisipatif dan inklusif.

Padang, Juli 2025

Penulis,

Akramul Mulsidi.S

Bp : 21100010

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari pencipta untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
ABSTRACT.....	V
DAFTAR GAMBAR.....	XI
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	7
1.3 TUJUAN PENELITIAN.....	8
1.4 SIGNIFIKASI PENELITIAN.....	8
BAB II.....	9
KERANGKA TEORI.....	9
2.2 PENDEKATAN TEORI	14
2.2.1. Upaya	14
2.2.2 Pembangunan partisipatif.....	16
2.3 SKEMA PENELITIAN.....	21
BAB III.....	22
METODE PENELITIAN	22
3.1 PENDEKATAN DAN DESAIN PENELITIAN	22
3.2 LOKASI INFORMAN PENELITIAN.....	22
3.3 INFORMAN PENELITIAN	23
3.4 TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	24
3.5 UNIT ANALISIS DATA.....	24
3.6 TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	24
3.7 UJI KEABSAHAN DATA.....	25
3.8 ANALISI DATA.....	27
3.9 RANCANGAN STRUKTUR PENULISAN.....	28
BAB IV	30
DESKRIPSI PENELITIAN DAN OBJEK PENELITIAN	30

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, mengganggakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagai seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari pencipta untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

4.1 DESKRIPSI DESA MONGAN POULA	30
4.1.1 Sejarah Desa Mongan Poula	30
4.1.2 Sejarah Pemerintahan Desa Mongan Poula	35
4.1.3 Visi dan Misi Desa Mongan Poula	37
4.1.4 Pemerintahan Desa Mongan Poula	37
4.1.5 Struktur Pemerintahan Desa Mongan Poula	39
BAB V	40
TEMUAN DATA DAN PEMBAHASAN	40
5.1 PENDEKATAN UPAYA PRESERVATIF PEMERINTAH DESA MONGAN POULA.....	41
5.2 PENDEKATAN UPAYA PREVENTIF PEMERINTAH DESA MONGAN POULA.....	47
5.3 PENDEKATAN UPAYA KURATIF PEMERINTAH DESA MONGAN POULA	50
5.4 PENDEKATAN UPAYA ADAPTIF PEMERINTAH DESA MONGAN POULA	53
BAB VI.....	56
PENUTUP.....	56
6.1 KESIMPULAN	56
6.2 SARAN	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN.....	62

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari pencipta untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Musrembang Desa Mongan Poula Tahun 2022	5
Tabel 2. 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 3. 1 Informan Penelitian.....	23
Tabel 4. 1 Nama-nama Team Peneliti Koordinasi Pembangunan Masyarakat Suku-suku Terasing.....	31
Tabel 4. 2 Nama-nama Wali Nagari/Kepala Pemerintahan Desa Mongan Poula.....	36
Tabel 4. 3 Data Lembaga-lembaga Desa Mongan Poula.....	38
Tabel 5. 1 Keterangan Kegiatan Musrembang Desa Mongan Poula Tahun 2022.....	45

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagai seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari pencipta atau penerbit. Kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Musrembang dan perencanaan pembangunan Daerah :	4
Gambar 2. 1 Skema Penelitian.....	21
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Mongan Poula Kecamatan Siberut Utara.....	39

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagai seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari pencipta untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 latar Belakang

Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah merupakan penyelenggaraan urusan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang undang 1945.¹ Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola rumah tangganya sendiri, termasuk dalam aspek administratif, fiskal, dan politik, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Selain itu, konsep daerah juga dapat dilihat dari perspektif geografi². Dalam konteks ini, daerah merujuk pada bagian permukaan bumi yang memiliki ciri khas tertentu, baik dari segi alam maupun sosial budaya, yang membedakannya dari wilayah lain di sekitarnya. Pemahaman ini penting dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah, karena setiap daerah memiliki karakteristik unik yang memerlukan pendekatan spesifik dalam pengembangannya.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat termasuk desa. Desa sebagai salah satu satuan atau wujud pemerintahan terendah dengan sejumlah penduduk yang merupakan kesatuan masyarakat dan bermukim dalam suatu daerah tertentu. Desa mempunyai kewenangan yang cukup luas dan

¹Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 Ayat(1).
²Aridhayandi, M. Rendi. Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik di bidang pembinaan dan pengawasan indikasi geografis, jurnal Hukum & pembangunan: Vol. 48: No. 4, Article 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagai seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari pencipta untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

menjadi tempat paling tepat bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan kepentingannya guna menjawab keperluan seluruh masyarakat setempat.³

Desa memiliki hak melakukan pembangunan sosial sebagai satu sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Pemerintah daerah kabupaten/kota menyerahkan sepenuhnya kepada desa tentang pelaksanaan pembangunan yang ada di setiap desa. Desa mempunyai kewenangan menata dan melayani warganya dalam semua aspek, baik dari segi pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Peran pemerintah desa amat di butuhkan dalam berbagai segi kehidupan masyarakatnya, perubahan baru dan perhatian pemerintah desa pada sarana dan prasarana desa. Desa mempunyai peran penting dalam melaksanakan perubahan yang maksimal.⁴

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 4 huruf d dikatakan bahwa desa bertujuan mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. Berlakunya undang-undang tersebut secara tidak langsung membuat posisi desa bergeser dari sekadar wilayah administrasi di bawah kecamatan menjadi entitas yang berhak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri berdasarkan prakarsa masyarakat setempat.⁵

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan desa di susun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota yang biasanya di bahas pada saat Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Pembangunan pedesaan sebagaimana yang dimaksud di susun oleh pemerintah desa dan partisipasi seluruh masyarakat desa. Mubyanto dalam Purnomo berpendapat bahwa partisipasi

³ Sutardjo Kartohadikudumo, *Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 12-15.
⁴ Kushandajani, *Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan pemerintahan Desa* (Semarang: UNDIP Press, 2020), hlm 45.
⁵ Indonesia, Undang-undang perencanaan pembangunan Desa, UU No. 6 Tahun 2014 ps. 4 hf d.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari pencipta atau pemegang hak cipta. Kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program pembangunan sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan sendiri. Dalam pembangunan desa, pemerintah dan masyarakat desa berpartisipasi dengan membentuk kolaborasi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁶

Perencanaan pembangunan menurut Afifuddin merupakan tugas utama atau kegiatan bersamayang membutuhkan banyak tenaga baik secara langsung maupun tidak langsung dalam administrasi atau manajemen pembangunan. Perencanaan dibutuhkan dalam memenuhi keperluan pembangunan yang lebih besar dari sumber daya yang ada, agar proses pembangunan nasional dapat meraih tujuan pembangunan secara maksimal seperti yang telah direncanakan dan di tentukan sebelumnya. Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan arah pembangunan yang terbatas dalam memperoleh tujuan kondisi sosial ekonomi yang lebih baik, dan efisien. Diketahui bahwa perencanaan pembangunan yang melibatkan ruang partisipasi masyarakat di wadah dalam wadah Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) yang dijalankan secara bertingkat sejak level unit pemerintah terbawah (desa/kelurahan) dan mencakup perencanaan pembangunan berjangka panjang, menengah, dan tahunan.⁷

Siklus waktu perencanaan pembangunan, dilaksanakan dalam 3 tahap, pertama: jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan jangka pendek (tahunan). Musrenbang merupakan forum antarpelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Melalui musrenbang, pendekatan perencanaan pembangunan secara bottom-up didorong sebagai medium untuk mendorong keterlibatan luas seluruh lapisan masyarakat untuk turut berkontribusi dalam pengambilan kebijakan

⁶ Mubyanto, dalam Purnomo, *Pembangunan Pedesaan*, (Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada, 2013) hlm. 120-122.

⁷ Afifuddin, *Perencanaan Pembangunan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010) Hlm. 23-25.

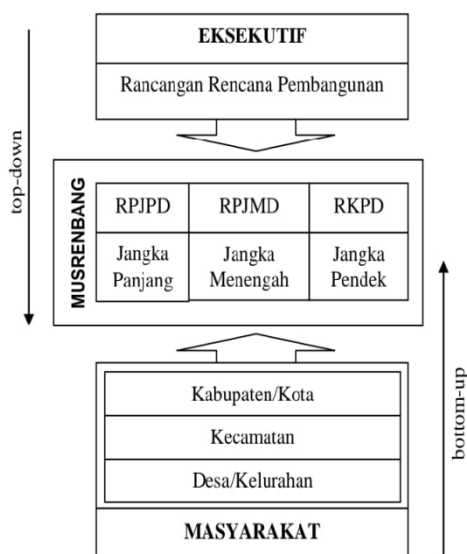
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggambar, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari pencipta untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

pembangunan yang dipadukan dengan mekanisme *top-down* dalam hal usulan rancangan kebijakan.⁸

Secara skematis, keberadaan forum Musrembang dalam daur proses perencanaan kebijakan pembangunan dapat di gambar kan sebagai berikut :

Gambar 1. 1 Musrembang dan perencanaan pembangunan Daerah :
Berdasarkan tahap dan tingkat perencanaan



Pelibatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan dan tingkatan perencanaan kebijakan dasar pembangunan daerah ini diharapkan dapat memastikan keterpaduan antara rancangan rencana pembangunan yang ditawarkan oleh Pemerintah Daerah dan usulan pembangunan yang dari masyarakat. Rancangan rencana pembangunan yang disusun oleh eksekutif ini merupakan skema perencanaan *top-down* yang selanjutnya dikonsultasikan dan

⁸ Modul Pelatihan Perencanaan Pembangunan Daerah. Kabupaten Kepulauan Mentawai, Tim Jurusan Politik Dan Pemerintahan, Fisipol UGM. Hlm 7-8

disesuaikan dengan skema perencanaan *bottom-up* melalui forum-forum Musrenbang.⁹

Salah satu desa yang memiliki partisipasi tinggi dalam perencanaan pembangunan desa melalui Musrembang adalah desa Mongan Poula Kecamatan Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai. Berdasarkan wawancara awal dengan perangkat desa Mongan Poula Kecamatan Sibeurt Utara Kepulauan Mentawai yaitu bapak Kairat, S.T selaku kaur perencanaan Partisipasi Masyarakat dalam Musrembang desa Mongan Poula Tergolong tinggi dengan rata-rata kehadiran mencapai 91 orang dari total 100 orang undangan. Seluruh perangkat desa hadir 100%, menunjukkan komitmen penuh dalam proses perencanaan pembangunan desa. Partisipasi tokoh masyarakat 10 orang, sementara kepala suku 10 orang dan perwakilan pemuda juga cukup tinggi, masing-masing mencapai 20 orang, warga masyarakat umum 50 orang. Hal ini menandakan adanya kesadaran yang cukup baik mengenai pentingnya keterlibatan dalam perencanaan pembangunan desa.

Berikut adalah Tabel Tingkat partisipasi Masyarakat dalam Musrembang Desa Mongan Poula Kecamatan Siberut Utara Kepulauan Mentawai Tahun 2022

Tabel 1. 1 Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Musrembang Desa Mongan Poula Tahun 2022

Kategori Peserta	Jumlah Undangan	Jumlah Hadir	Presentase Kehadiran (%)
Perangkat Desa	10	10	100%
Tokoh Masyarakat	10	8	90%
Perwakilan	20	18	90%

⁹Ibid, Hlm 7-8

Kelompok pemuda			
Kepala Suku	10	10	100%
Warga Masyarakat Umum	50	45	90%
Total	100	91	92%

Sumber : Data desa Mongan Poula

Selain itu, hasil dari partisipasi masyarakat terlihat dari realisasi program Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) yang di usulkan pada Musrembang tahun 2020. Hal ini dibenarkan oleh PJ Bupati Mentawai dimana telah di jelaskan 200 unit rumah di peruntukan bagi desa Mongan Poula¹⁰ Disamping itu menurut Zakirman¹¹ selaku pelaksana sementara kepala Dinas perumahan dan Kawasan pemukiman(DPKP) mengatakan Dinas sedang berjuang memasukkan data sebanyak 7000 untuk dapat di bantu melalui program bantuan Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) bersama data dan KTP warga Masyarakat setempat untuk dapat di data sebagai penerima bantuan (RTLH). “Kita juga mengapresiasi dan berterimakasih atas kerja sama warga setempat, sehingga pembangunan rumah baru dapat berdiri tepat waktu dan sesuai yang di targetkan”.¹²

Sementara itu, jika melihat perkembangan partisipasi masyarakat di Kepulauan Mentawai secara keseluruhan dari data yang di dapat, rata-rata partisipasi masyarakat dalam musrembang di Kabupaten Kepulauan Mentawai terbilang rendah¹³ disebabkan beberapa hal permasalahan terkait partisipasi yaitu :

¹⁰Investigasi Niws.2023, 25 Februari. *Peresmian Bantuan Rumah RTLH di Desa Mongan Poula*

¹¹Ibid, Hlm 9

¹²Ibid, Hlm 9

¹³Modul Pelatihan Perencanaan Pembangunan Daerah. Kabupaten Kepulauan Mentawai, Tim Jurusan Politik Dan Pemerintahan, Fisipol UGM.hlm 11-13

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagai seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari pencipta untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

- A. Masalah dalam aspek keterwakilan
 - a. Kesulitan mengidentifikasi isu kebijakan yang bisa di-*share* ke publik
 - b. Kesulitan dalam mengidentifikasi kebutuhan publik
 - c. Kegagalan mengakomodasi suara dan masalah sosial yang relevan dengan kebutuhan kelompok-kelompok pinggiran dan marjinal
 - d. Kesukaran untuk mengidentifikasi pihak yang relevan dengan isu
- B. Masalah dalam aspek keterlibatan
 - a. Forum publik yang tidak efektif
 - b. Forum publik yang tidak efisien (keterbatasan waktu)
 - c. Lemahnya sistem dukung dan daya dukung lingkungan¹⁴

Hal ini tentu berbanding terbalik dengan realisasi partisipasi masyarakat pada musrembang di kebanyakan daerah di kabupaten Kepulauan Mentawai. Di saat daerah lain mengalami penurunan tingkat partisipasi justru desa Mongan Poula menunjukkan peningkatan partisipasi dan kontribusi masyarakat dalam musrembang, begitupun saat pelaksanaan program pembangunan infrastruktur desa di jalankan.

Berdasarkan uraian di atas menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian terkait Upaya Pemerintah desa Dalam mendorong partisipasi masyarakat terhadap Pembangunan Infrastruktur desa Mongan Poula, Kecamatan Siberut Utara, Kepulauan Mentawai.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, maka masalah yang akan di kaji yaitu : Bagaimana Upaya pemerintah desa Mongan Poula Kecamatan Siberut Utara Kepulauan Mentawai dalam mendorong partisipasi Masyarakat terhadap pembangunan desa dan apa Faktor yang mempengaruhinya ?

¹⁴ Ibid, Hlm 9

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas , ada pun tujuan yang di capai dari penelitian ini yaitu : Untuk mengetahui Upaya Pemerintah desa Mongan Poula Kecamatan Siberut Utara dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat terhadap pembangunan desa dan apa Faktor yang mempengaruhinya.

1.4 Signifikasi Penelitian

Manfaat penelitian merupakan proses hasil dari tercapainya tujuan, maka dari itu tujuan tersebut dapat di jelaskan yaitu :

1. Secara teoritis

Secara teoritis sebagai sumber informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai Upaya Pemerintah desa Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat terhadap pembangunan desa Mongan poula kecamatan Siberut Utara kepulauan Mentawai dan sebagai masukan bagi para peneliti lanjutan.

2. Secara praktis

Sebagai tolak ukur bagi pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa Mongan poula Kecamatan Siberut Utara kepulauan Mentawai.